

**LOKAKARYA NASIONAL
KELEMBAGAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
8 - 11 Oktober 2002**

**STRATEGI PEMBERDAYAAN GHIPPA
IMPLEMENTASI PKPI TAHUN 2002
PROPINSI JAWA TIMUR**

OLEH:

**Ir. HERU ERNANDA, MT
Kepala Pusat Pengembangan Sumberdaya Air
Lembaga Penelitian Universitas Jember**



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. TM. Pahlawan No. 20, Kalibata, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7942651-53**



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 25 September 2002

Nomor : 005/1678/V1/Bangda
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Lokakarya Kelembagaan Perkumpulan
Petani Pemakai Air (P3A) Tahun 2002

Kepada Yth.
(daftar terlampir)
di -
tempat

Dalam rangka pelaksanaan Lokakarya Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Tahun 2002, bersama ini dimohon kehadiran Saudara untuk hadir sebagai narasumber.

Adapun acara tersebut diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa – Jumat/ 8 – 11 Oktober 2002
Waktu : 19.30 – 21.30 WIB
Tempat : Hotel Aston Atrium Senen
Jalan Senen Raya No. 135, Jakarta Pusat

Demikian untuk maklum, atas kehadiran Saudara diucapkan terimakasih.

DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH,



DAFTAR TERLAMPIR (NARASUMBER):

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Dr. Muhammad Maksum | Direktur Pusat Studi Perdesaan dan Kawasan , Universitas Gadjah Mada |
| 2. Ir. Budi Susilo, Dipl. HE | Dinas Pengairan Propinsi Jawa Timur |
| 3. Ir. Anwar | Dinas PU Kab. Kulon Progo |
| 4. Drs. Budi Harsoyo, Msi | Biro Perencanaan, Dep. Dalam Negeri |
| 5. Ir. Indro Tjahjono | SKEPHI |
| 6. Ir. Budi Susilo, Dipl. HE | Kadin Pengairan, Pertambangan & Energi Kab. Banyumas |
| 7. Ir. Bambang Adinugroho, MA | Pokja IV |
| 8. Ir. Sudar D. Atmanto, MMA | LP3ES |
| 9. Ir. Budi Raharjo | Bappeda Kab. Ogan Komering Ulu |
| 10. Drs. Nuryanto, MPA | Ditjen. Bina Bangda |
| 11. Dr. Susetiawan | Pusat Studi Perdesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada |
| 12. Dr. Heru | Universitas Jember |
| 13. Ir. Sudarmanto | Dit.PSDA, Dep.Kimpraswil |
| 14. Ir. Suliyanti, M.Eng | Dinas PSDA Propinsi Jawa Barat |
| 15. Ir. M. Soleh | Bappeda Kab. Probolinggo |



MODERATOR

DEPT. AIR
KEM. PERK. AIR



LOKAKARYA KELEMBAGAAN P3A
(Perkumpulan Petani Pemakai Air)
Hotel Aston Atrium Jakarta, 8 s/d 11 Oktober 2002

Mitra Photo-Telp. 7344 0324 / 0812 sd 56 561



**LOKAKARYA KELEMBAGAAN P3A
(Perkumpulan Petani Pemakai Air)**

Hotel Aston Atrium Jakarta, 8 s/d 11 Oktober 2002

Mitra Photo Telp. 7344 0924 / 0812 80 56 561



MODERATOR



LOKAKARYA KELEMBAGAAN P3A
(Perkumpulan Petani Pemakai Air)
Hotel Aston Atrium Jakarta, 8 s/d 11 Oktober 2002

STRATEGI PEMBERDAYAAN GHIPPA IMPLEMENTASI PKPI TAHUN 2002 – PROPINSI JAWA TIMUR¹⁾

Oleh Ir. Heru Ernanda, MT²⁾

RINGKASAN

Usaha peningkatan irigasi dalam mendukung peningkatan produksi pertanian, dilakukan langkah-langkah Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI). Titik tolak Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan irigasi dengan meningkatkan peran-serta perkumpulan petani pemakai air yang otonom, mandiri dan mengakar pada masyarakat, sehingga terwujudnya sistem irigasi yang berkelanjutan.

Hasil implementasi PKPI pada tahun 2000 dan 2001, telah meningkatkan peran pokja kabupaten dan kelembagaan perkumpulan petani pemakai air. Potensi dan kemampuan perkumpulan petani telah dilakukan digali dan dikaji secara partisipatif dan dituangkan dalam bentuk Profil Sosio Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK). Evaluasi secara keseluruhan menunjukkan GHIPPA mengalami kesulitan dalam aktivitas kelembagaan dan teknis. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian strategi pemberdayaan dengan prioritas peningkatan aktivitas kelembagaan, teknis dan keuangan yang difasilitasi oleh KPL dan pokja kabupaten, didukung oleh kebijakan peraturan daerah.

Tujuan penyusunan strategi pemberdayaan adalah melakukan evaluasi potensi GHIPPA hasil implementasi pada tahun sebelumnya, dan menyusun strategi pemberdayaan dengan prioritas peningkatan aktivitas kelembagaan, teknis dan keuangan yang difasilitasi oleh KPL dan pokja kabupaten, didukung oleh kebijakan peraturan daerah.

Hasil kajian strategi pemberdayaan menunjukkan perlu dilakukan kegiatan partisipatif dan kesepakatan dalam (i) aspek organisasi dilakukan kegiatan memperkuat kelembagaan, sosialisasi tata laksana kelembagaan GHIPPA, (ii) aspek teknis dilakukan kesepakatan daerah layanan, saluran dan bangunan, serta pembagian peran dan wewenang operasi dan pemeliharaan; (iii) aspek keuangan perlu dilakukan sosialisasi IPAIR, memperkuat komponen pendukung IPAIR, mengupayakan Produk Hukum/Kebijakan Kabupaten dalam mendukung pengelolaan IPAIR oleh petani, membuka wacana pengembangan usaha ekonomi dan Sosialisasi/Penyusunan Proposal Pengajuan Dana ke Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten (DPIK).

Kata Kunci : Pembaharuan Pengelolaan Irigasi, Pemberdayaan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Propinsi Jawa Timur terletak pada 110°54' BT Sampai 115°57' BT dan 5°37' LS sampai 8°48' LS dengan potensi sawah teknis 715.183 Ha, setengah teknis 98.060 Ha dan sawah sederhana 98.998 Ha. Pada tahun 2001, pembangunan sektor pertanian telah menghasilkan luas panen padi seluas 1.708.562 Ha dengan rata-rata produksi sebesar 50,76 Ku/Ha, sehingga mampu menghasilkan produksi sebesar 8.673.242 ton (Biro Pusat Statistik, 2002). Hal ini merupakan sumbangan

Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam mencapai penyediaan pangan kurang lebih 17,5% dari stok Pangan Nasional.

Irigasi menempati posisi yang amat penting dalam pembangunan pertanian karena perannya yang esensial dalam kegiatan produksi pertanian di lahan basah khususnya padi (Helmi, 1998). Karena irigasi sebagai usaha penyediaan dan pengaturan air untuk tujuan pertanian (PP No. 23/1982 tentang Irigasi, Pasal 1 butir j), atau irigasi sebagai pemberian air terhadap tanah untuk memasok lengas utama bagi pertumbuhan tanaman (Hansen et al., 1980).

Usaha peningkatan irigasi dalam mendukung peningkatan produksi pertanian, dilakukan langkah-langkah Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) dengan berlakunya (i) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001, (ii) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air; dan (iii) Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi Kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air. Titik tolak Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan irigasi dengan meningkatkan peran-serta perkumpulan petani pemakai air yang otonom, mandiri dan mengakar pada masyarakat, sehingga terwujudnya sistem irigasi yang berkelanjutan.

Dalam mendukung pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (HIPPA/GHIPPA/IHIPPA), maka dilakukan Program pengadaan dan penempatan Tenaga Pendamping (TPP) atau *Community Organizer* (CO) yang bertugas membantu Pemerintah dalam pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air guna melaksanakan PKPI.

Program pengadaan dan penempatan TPP diharapkan mampu meningkatkan pemanfaatan basis potensi masyarakat yang meliputi potensi sosial budaya, potensi sumberdaya, teknologi lokal, serta semangat partisipasi masyarakat. Potensi sosial budaya dan semangat partisipasi ini diwujudkan dalam pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, sehingga perkumpulan petani pemakai air mampu memiliki sikap otonom, mandiri dan mengakar pada masyarakat, sehingga perkumpulan petani pemakai air mampu mengelola dan mewujudkan sistem irigasi yang berkelanjutan.

Program Pengadaan dan Penempatan TPP ini merupakan kelanjutan dari Program Pengadaan dan Penempatan TPP yang dimulai tahun 2000 sampai tahun 2001. Program pengadaan dan penempatan TPP I pada tahun 2000 dan 2001, telah meningkatkan peran pokja kabupaten dan kelembagaan perkumpulan petani pemakai air. Potensi dan kemampuan perkumpulan petani telah dilakukan digali dan dikaji secara partisipatif dan dituangkan dalam bentuk Profil Sosio Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK).

Potensi dan kondisi GHIPPA sangatlah bervariasi, mulai dari awal proses pembentukan sampai GHIPPA yang telah mampu menghasilkan iuran pengelolaan irigasi. Evaluasi secara keseluruhan menunjukkan GHIPPA mengalami kesulitan dalam aktivitas kelembagaan dan teknis. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian strategi pemberdayaan dengan prioritas peningkatan aktivitas kelembagaan, teknis

dan keuangan yang difasilitasi oleh KPL dan pokja kabupaten, didukung oleh kebijakan peraturan daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan Strategi Pemberdayaan

Tujuan penyusunan strategi pemberdayaan adalah melakukan evaluasi potensi GHIPPA hasil implementasi pada tahun sebelumnya, dan menyusun strategi pemberdayaan dengan prioritas peningkatan aktivitas kelembagaan, teknis dan keuangan yang difasilitasi oleh KPL dan pokja kabupaten, didukung oleh kebijakan peraturan daerah.

Diharapkan peningkatan aspek aktivitas kelembagaan, teknis, dan keuangan yang difasilitasi oleh KPL dan Pokja, serta didukung oleh kebijakan peraturan daerah, mampu menghasilkan perkumpulan petani pemakai air yang memiliki sikap otonom, mandiri dan mengakar pada masyarakat, sehingga perkumpulan petani pemakai air mampu mengelola irigasi dan mewujudkan sistem irigasi yang berkelanjutan.

1.3 Lokasi Kajian

Evaluasi kelembagaan, teknis dan keuangan dilakukan terhadap 100 GHIPPA yang tersebar di seluruh kabupaten - Propinsi Jawa Timur. Dari 100 GHIPPA, 41 GHIPPA melaksanakan 47 paket konstruksi partisipatif.

1.4 Metodologi

Metodologi yang dilaksanakan adalah :

- (1) Metode Partisipatif dalam penyusunan data pada PSTEK, disesuaikan dengan kemampuan petani
- (2) Metode Evaluasi teknik dilakukan berdasarkan Standard Konstruksi
- (3) Metode Penentuan langkah startegis dilakukan berdasarkan prioritas penyelesaian permasalahan yang dihadapi

II. POTENSI DAN KEADAAN GHIPPA – IMPLEMENTASI PKPI 2001

Potensi dan keadaan merupakan potensi dan keadaan GHIPPA hasil implementasi PKPI Tahun 2001, dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi data yang terdapat pada PSTEK, serta evaluasi konstruksi.

2.1 Wilayah Kerja Administrasi, Hidrologis dan Pengelolaan Irigasi GHIPPA

Wilayah kerja administrasi, hidrologis dan pengelolaan irigasi di Propinsi Jawa Timur dilakukan evaluasi terhadap 100 GHIPPA dengan hasil evaluasi

menunjukkan 86 GHIPPA dapat menunjukkan wilayah administrasi dengan baik, 75 GHIPPA dapat menunjukkan wilayah hidrologis dan pengelolaan irigasi dengan baik.

Wilayah kerja GHIPPA kajian di propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

(1) Wilayah Kerja Administrasi		
a. Jumlah Desa	1 – 5 Desa	25,00 GHIPPA
	5 -10 Desa	35,00 GHIPPA
	> 10 Desa	26,00 GHIPPA
	Rata-rata	7,92 desa/GHIPPA
b. Jumlah kecamatan		2,12 kec/GHIPPA
(2) Wilayah Hidrologis/Irigasi		
Luas Layanan	< 250 Ha	22,00 GHIPPA
	250 -500 Ha	17,00 GHIPPA
	500 - 750 Ha	28,00 GHIPPA
	750 - 1000 Ha	14,00 GHIPPA
	> 1000 Ha	19,00 GHIPPA
	Rata-rata	783,05 Ha/GHIPPA
(3) Pengelolaan Irigasi		
a. Jumlah Saluran Primer		1,15 buah
b. Jumlah Saluran Sekunder		1,21 buah
c. Petak Tersier	< 5	36,00 GHIPPA
	5 - 10	13,00 GHIPPA
	10 – 15	18,00 GHIPPA
	16 – 20	15,00 GHIPPA
	> 20	1,00 GHIPPA

2.2 Organisasi GHIPPA

Potensi dan keadaan organisasi GHIPPA di daerah sample Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

(1) Struktur Organisasi

Pengurus GHIPPA pada umumnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, bagian teknis.

Kajian terhadap 100 GHIPPA di propinsi Jawa Timur menunjukkan sebagai berikut :

a. Jumlah ketua	100 orang
b. Jumlah Wakil Ketua	101 orang
c. Sekretaris	104 orang
d. Bendahara	103 orang
e. Bagian Teknis	120 orang

Permasalahan :

- a. Pada umumnya setiap GHIPPA memiliki satu orang untuk jabatan ketua, wakil ketua, sekeretaris dan bendahara, kecuali beberapa GHIPPA. Kelebihan personil ini pada umumnya tidak berdasarkan atas efektivitas organisasi.

- b. Jumlah personil bagian teknis bervariasi antara 1 sampai 6 orang. Hubungan antara jumlah bagian teknis dengan luas areal dan tingkat konflik yang terjadi adalah sebagai berikut :
- Tidak menunjukkan hubungan antara semakin luas layanan, maka jumlah bagian teknis semakin meningkat.
 - Tidak menunjukkan hubungan antara daerah layanan yang terjadi konflik, baik antar anggota, antar petak maupun antar saluran sekunder, membutuhkan jumlah bagian teknis yang semakin meningkat.

Luas layanan yang semakin luas membutuhkan jumlah personil bagian teknis yang lebih banyak, karena efektivitas kerja bagian teknis yang belum optimal.

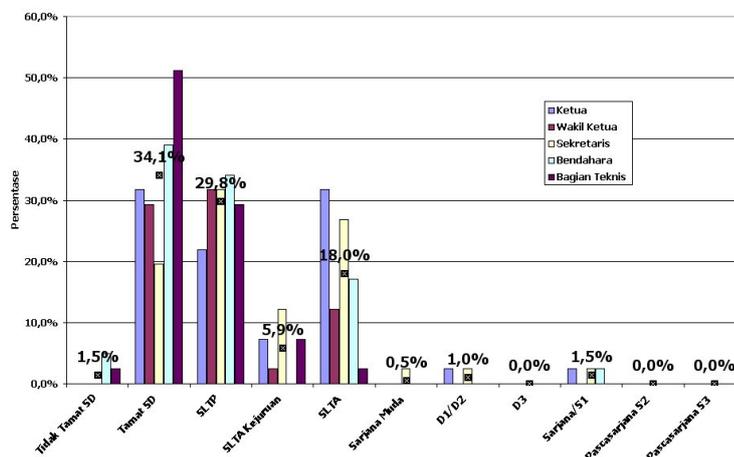
(2) Kemampuan Pengurus GHIPPA

Hasil kajian terhadap 41 GHIPPA menunjukkan kemampuan pengurus GHIPPA sebagai berikut :

a. Tingkat Pendidikan Pengurus GHIPPA

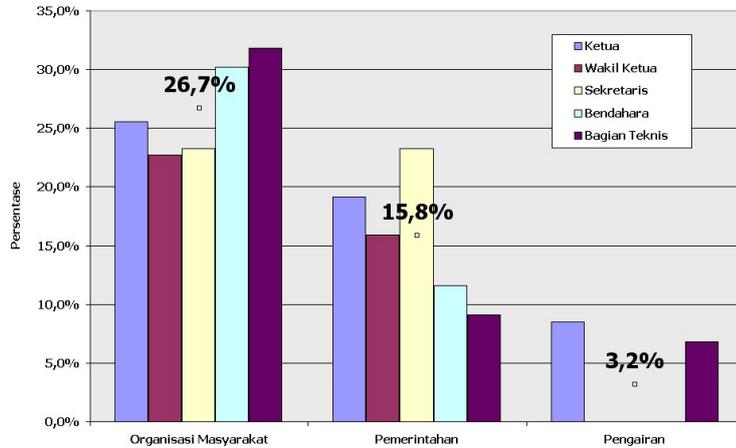
Tingkat pendidikan pengurus GHIPPA menunjukkan sebagai berikut :

- Pada umumnya dominansi pengurus GHIPPA berpendidikan tamat SD dan SLTP, sebesar 34,1% dan 29,8%. Dominansi tamat SD paling banyak adalah bagian teknis.
- Pendidikan SLTA kejuruan dan SLTA didominasi oleh sekretaris dan Ketua, sebesar 23,9%.
- Pendidikan sarjana muda, D1/D2 dan S1, dipegang oleh Ketua, Sekretaris dan bendara.



b. Pengalaman Organisasi

Pengalaman organisasi pengurus GHIPPA adalah sebagai berikut :

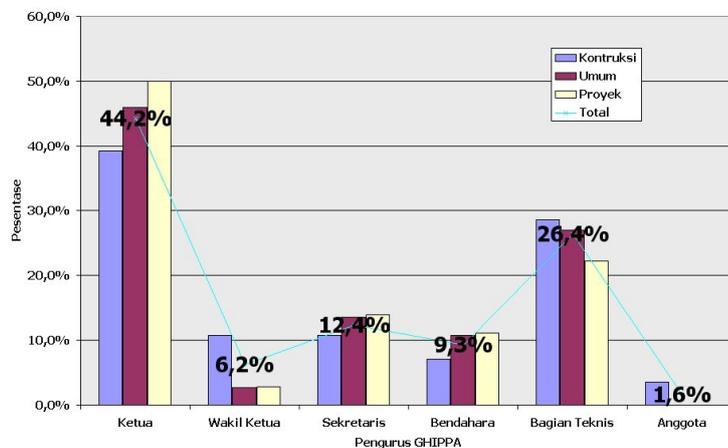


- Pada umumnya pengurus GHIPPA mempunyai pengalaman organisasi masyarakat (RT, RW, Dusun, KUD dan lain-lain) dan organisasi pemerintah (aparatur desa/kecamatan, dan lain-lain);
- Pengalaman organisasi pengairan hanya sedikit yang memiliki 3,2% dari sample.

Berdasarkan evaluasi ini, pengurus GHIPPA memiliki kemampuan organisasi, tetapi pengalaman irigasi sangat kurang.

b. Peningkatan Kemampuan Pengurus GHIPPA

Peningkatan Kemampuan Pengurus GHIPPA telah dilakukan dengan pelatihan-pelatihan :

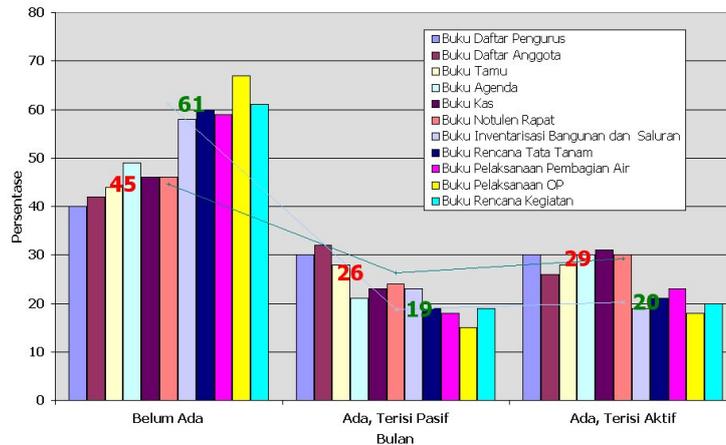


Keterbatasan pelatihan mengakibatkan kecenderungan :

- Ketua mengikuti berbagai aspek pelatihan
- Ketua diharapkan dapat mentranfer pengetahuan

(3) Administrasi Kelembagaan

Administrasi kelembagaan dipisahkan untuk administrasi kelembagaan dan catatan untuk operasi dan pemeliharaan. Hasil kajian menunjukkan data sebagai berikut :



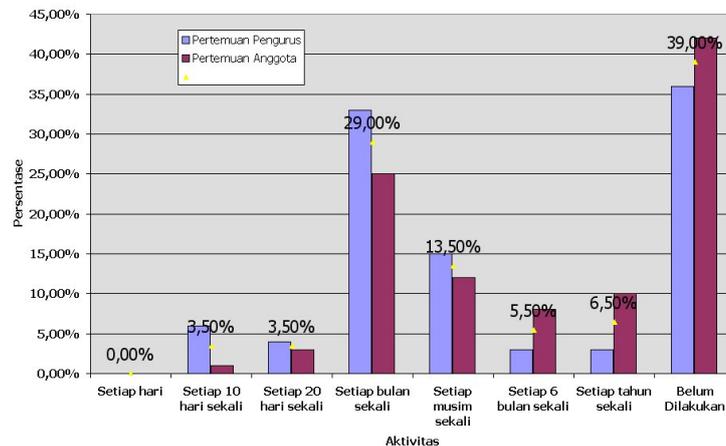
- Administrasi yang berjalan dengan baik hanya 29% untuk administrasi umum dan 20% untuk administrasi pelaksanaan OP
- Administrasi umum lebih baik daripada administrasi OP

2.3 Aktivitas GHIPPA

Aktivitas organisasi GHIPPA di daerah sample Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

(1) Pertemuan Pengurus dan Anggota

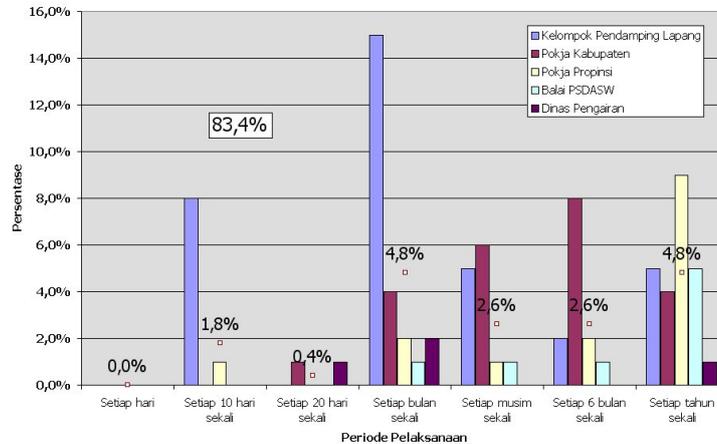
Proses pemberdayaan yang dilakukan di Propinsi Jawa Timur secara bertahap. Pada tahap awal ditunjukkan oleh pertemuan anggota dan pengurus.



- Pada umumnya pertemuan anggota dan pengurus belum dilakukan secara berkala (39%). Pertemuan ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- Secara berkala, pertemuan banyak dilakukan sebulan sekali (29%). Pertemuan setiap 10 hari sekali, banyak dikehendaki oleh GHIPPA yang mengalami kesulitan didalam pembagian air, terutama DI. Sampean Baru.

(2) Fasilitas Pendampingan oleh Instansi

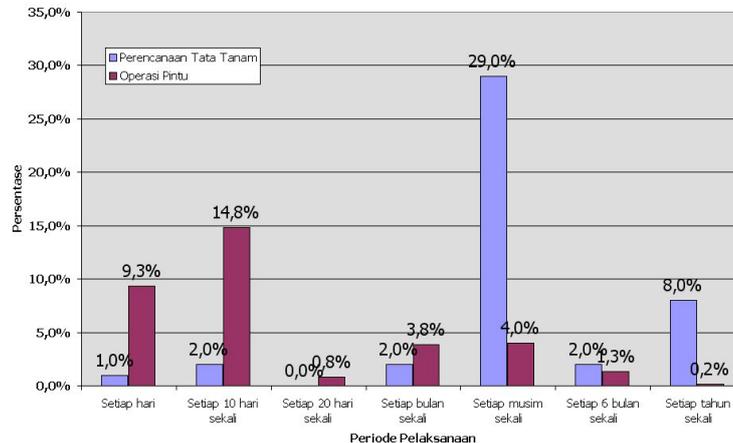
Fasilitas pendampingan yang dilakukan oleh Instansi, disajikan



- Pada umumnya fasilitas pendampingan masih berjalan secara periode, 84% dari GHIPPA mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka.
- Keterlibatan unsur KPL lebih tinggi dari yang lainnya yang dilakukan setiap bulan sekali.
- Unsur-unsur instansi lainnya lebih dari periode setiap bulan sekali.

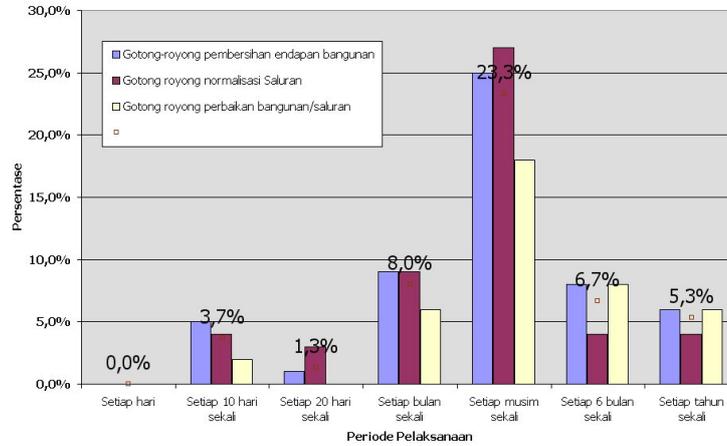
(3) Operasi Jaringan Irigasi

Operasi jaringan irigasi dipisahkan menjadi rencana tata tanam dan operasi pintu.



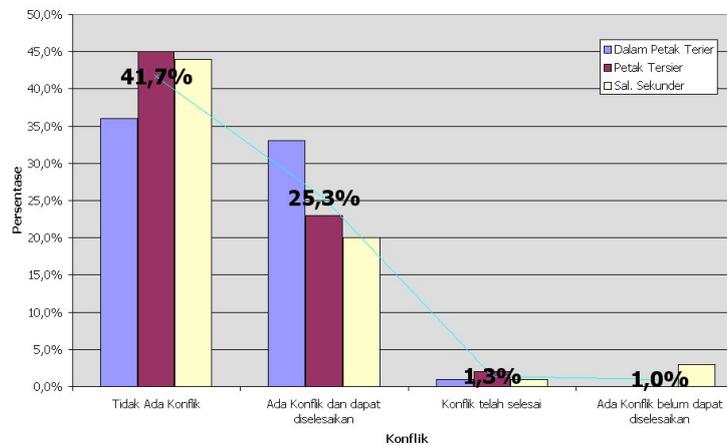
- Perencanaan Tata tanam dikehendaki dalam setiap musim sekali (29% GHIPPA)
- Operasi pintu air dalam pembagian air dilakukan setiap hari (9,3%) dan setiap 10 hari sekali (14,8%).

(4) Pemeliharaan Jaringan Irigasi



- Pada umumnya petani memilih pemeliharaan secara gotong-roiyong setiap musim sekali, sesuai ketersediaan waktu dan kebiasaan petani.
- Kemampuan petani dalam pemeliharaan pada umumnya pembersihan endapan dan normalisasi saluran.

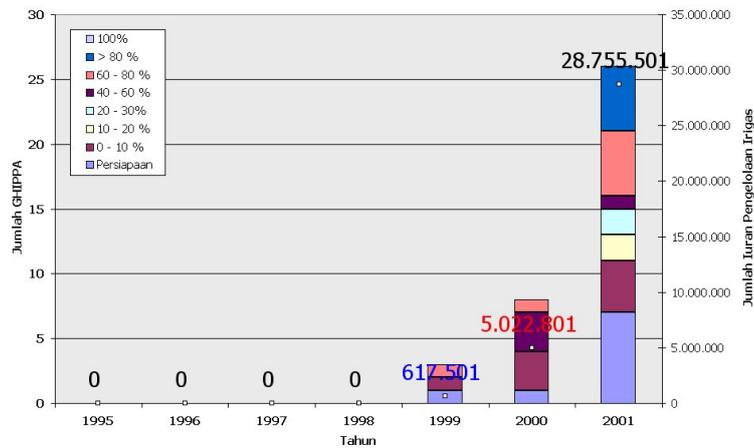
(4) Konflik pembagian air



- Pada umumnya pembagian air irigasi tidak terjadi konflik (41,7%)
- GHIPPA mampu mengatasi konflik yang ada (25,3%) dan konflik yang terjadi pada umumnya terjadi dalam petak tersier yang merupakan wilayah HIPPA.

2.4 Iuran Pengelolaan Irigasi

Iuran pengelolaan irigasi wilayah kajian implementasi yang dilakukan monitoring pada pelaksanaan konstruksi adalah sebagai berikut :



Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap IPAIR adalah sebagai berikut :

(1) Faktor pendukung

Faktor pendukung bagi pelaksanaan IPAIR adalah

- a. Keberadaan data anggota 18 GHIPPA
- b. Prakiraan kebutuhan irigasi 4 GHIPPA
- c. Kesepakatan IPAIR 21 GHIPPA
- d. Perbaikan AD/ART 4 GHIPPA
- e. Aktifkan unsur pelaksana 20 GHIPPA
- f. Membayar sesuai dengan kemampuan 4 GHIPPA
- g. Lain-lain 4 GHIPPA

(2) Faktor penghambat

Faktor pendukung bagi pelaksanaan IPAIR adalah

- a. Anggota kurang sadar 27 GHIPPA
- b. Tidak ada petugas 5 GHIPPA
- c. Tidak ada dasar hukum 6 GHIPPA
- d. Lain-lain 4 GHIPPA

2.5 Kemampuan GHIPPA dalam Konstruksi Parsitipatif

Konstruksi partisipatif adalah kegiatan konstruksi yang dilaksanakan oleh GHIPPA dengan pendamping oleh Tenaga Pendamping Petani.

Sebelum kegiatan konstruksi, dilakukan pelatihan konstruksi dan manajemen konstruksi bagi GHIPPA yang akan melaksanakan.

Konstruksi yang dilaksanakan GHIPPA adalah :

(1) Perbaikan saluran

Perbaikan saluran yang dilaksanakan dengan panjang berkisar antara 76,00 m sampai 800,00 m dan rata-rata 224,31 m untuk setiap GHIPPA.

(2) Bangunan pengatur

Bangunan pengatur yang dilaksanakan berkisar 1 sampai 6 buah bangunan untuk setiap GHIPPA. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh

7 GHIPPA.

(3) Bangunan Pelengkap

Bangunan pelengkap yang dilaksanakan oleh GHIPPA berkisar antara 1 sampai 11 buah dengan rata-rata setiap 5,75 bangunan setiap GHIPPA.

Kontrak yang dilaksanakan berkisar antara Rp. 20.659.000,00 sampai Rp. 45.888.000,00 dengan rata-rata Rp. 34.873.023,26 setiap GHIPPA.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan konstruksi partisipatif adalah sebagai berikut :

- (1) Penelusuran dan PPKP
- (2) Pra Konstruksi
- (3) Pelaksanaan Konstruksi
- (4) Pasca Konstruksi

2.5.1 Penelusuran Jaringan Irigasi

Penelusuran jaringan irigasi yang dilakukan oleh 41 GHIPPA guna menentukan kerusakan saluran dan bangunan menunjukkan karakteristik sebagai berikut :

- (1) Waktu Pelaksanaan Penelusuran
 - a. Sebelum Penunjukkan 2 GHIPPA 4,9%
 - b. Saat Penunjukan 16 GHIPPA 39,0%
 - c. Penelusuran Ulang 20 GHIPPA 48,8%
- (2) Pengikut Penelusuran
 - a. Ketua 34 GHIPPA 82,9%
 - b. Wakil Ketua 6 GHIPPA 14,6%
 - c. Sekretaris 10 GHIPPA 24,4%
 - d. Bendahara 7 GHIPPA 17,1%
 - e. Petani 8 GHIPPA 19,5%
 - f. Bagian Teknis 25 GHIPPA 61,0%
 - g. Anggota 9 GHIPPA 22,0%
 - h. Juru/Mantri Pengairan 28 GHIPPA 68,3%
 - i. PPL/Mantri Pertanian 6 GHIPPA 14,6%
 - j. Unsur Pemerintah Desa 2 GHIPPA 4,9%
 - k. Unsur Pemerintah Kecamatan 6 GHIPPA 14,6%
 - l. Cabang Seksi 23 GHIPPA 56,1%
 - m. Dinas Pengairan 11 GHIPPA 26,8%
 - n. Bappeda 3 GHIPPA 7,3%
- (3) Identifikasi kerusakan saluran dan bangunan
 - a. Kerusakan saluran

1 lokasi	9 GHIPPA	22,0%
2 lokasi	8 GHIPPA	19,5%
3 lokasi	1 GHIPPA	2,4%

	4 lokasi	5 GHIPPA	12,2%
	5 lokasi	7 GHIPPA	17,1%
	-	11 GHIPPA	26,8%
b. Kerusakan bangunan	1 lokasi	1 GHIPPA	2,4%
	2 lokasi	1 GHIPPA	2,4%
	3 lokasi	3 GHIPPA	7,3%
	6 lokasi	1 GHIPPA	2,4%
(4) Dominansi Pengambilan Keputusan dalam Penentuan Lokasi			
a. GHIPPA			
• Ketua		31 GHIPPA	75,6%
• Wakil Ketua		3 GHIPPA	7,3%
• Sekretaris		4 GHIPPA	9,8%
• Bendahara		3 GHIPPA	7,3%
• Bagian Teknis		16 GHIPPA	39,0%
• Anggota		8 GHIPPA	19,5%
b. Fasilitas Bantuan Pemilihan Lokasi			
• Juru/Mantri Pengairan		17 GHIPPA	41,5%
• PPL/Mantri Pertanian		-	-
• Unsur Pemerintah Desa		-	-
• Unsur Pemerintah Kecamatan		-	-
• Cabang Seksi/UPTD		9 GHIPPA	22,0%
• Dinas Pengairan		3 GHIPPA	7,3%
• Bappeda		-	-
• Bagian Proyek Irigasi Jawa Timur		9 GHIPPA	22,0%
• Pengawas Daerah		11 GHIPPA	26,8%
• Pengawas Lapang		9 GHIPPA	22,0%
• Petani/Anggota		3 GHIPPA	7,3%
• CO		2 GHIPPA	4,9%

2.5.2 Pra Konstruksi Partisipatif

Penelusuran jaringan irigasi yang dilakukan oleh 41 GHIPPA guna menentukan kerusakan saluran dan bangunan menunjukkan karakteristik sebagai berikut :

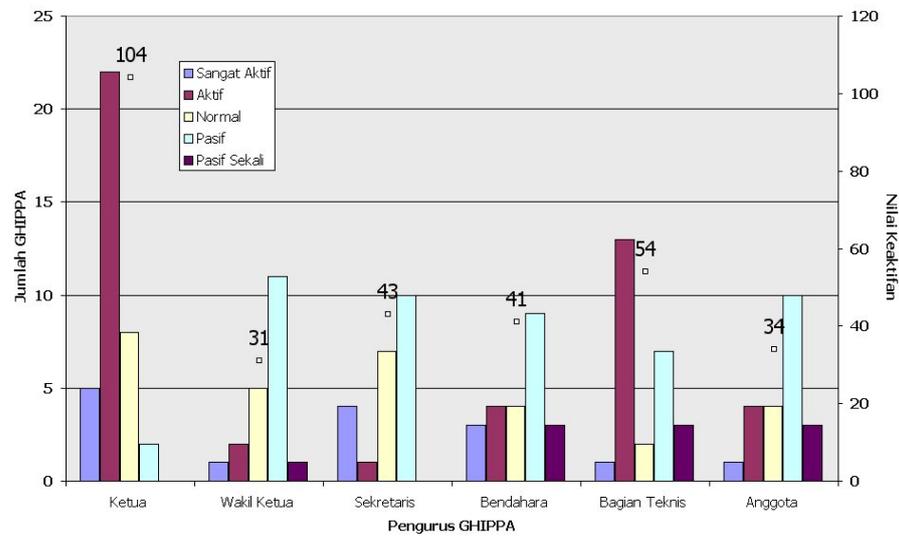
(1) Proses Penawaran Pekerjaan

Keaktifan proses pengerjaan pekerjaan penawaran menunjukkan :

- a. Pengurus GHIPPA yang aktif adalah Ketua dan Bagian Teknis
- b. Proses penawaran merupakan proses pembuatan dokumen penawaran yang meliputi perhitungan volume pekerjaan dan rencana anggaran.

Kemampuan GHIPPA adalah sebagai berikut :

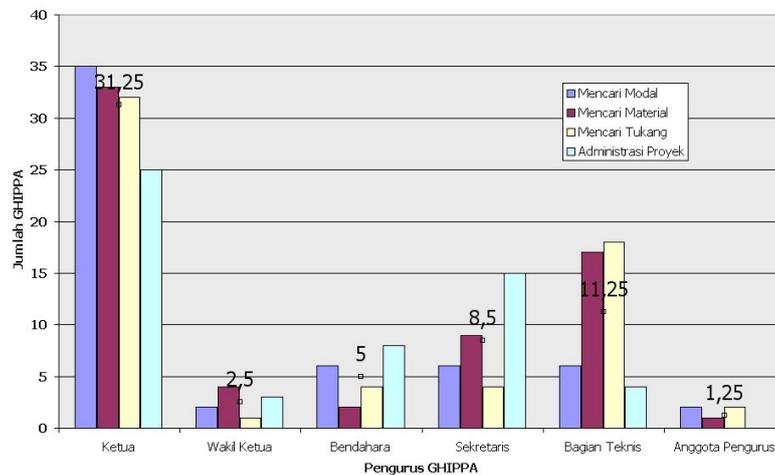
• Sangat Mampu	1 GHIPPA	2,1%
• Mampu	7 GHIPPA	14,9%
• Cukup Mampu	16 GHIPPA	34,0%



- Kurang Mampu 15 GHIPPA 31,9%
- Tidak Mampu 1 GHIPPA 2,1%

Kelemahan GHIPPA dalam menghitung volume pekerjaan dan rencana anggaran.

- (2) Pelaksanaan pekerjaan selain pekerjaan penawaran, GHIPPA harus melaksanakan pekerjaan lain, antara lain mencari modal, mencari material, mencari tukang dan administrasi proyek lainnya.



Keterlibatan pengurus dalam pekerjaan persiapan konstruksi menunjukkan Ketua dan Bagian Teknis yang berperan.

2.5.3 Konstruksi Partisipatif

Tahapan Kontruksi partisipatif dipisahkan menjadi proses 0-30%, 30%-70% dan 70%-100% dengan karakteristik :

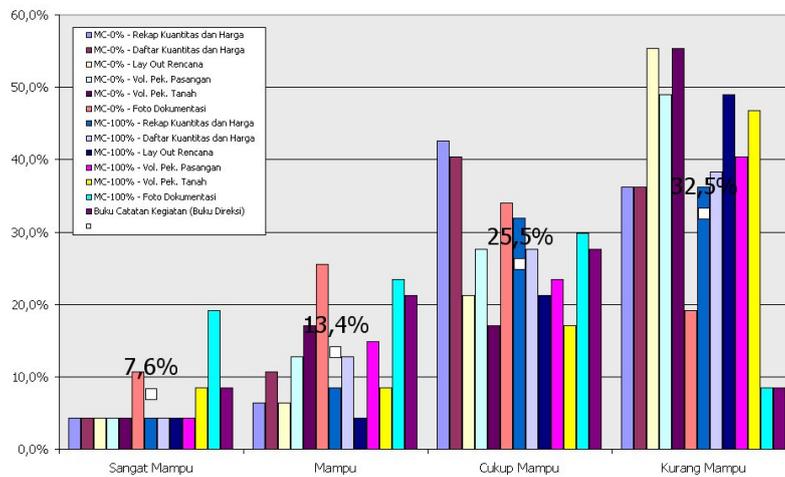
- (1) Keterlibatan Pengurus GHIPPA

(1) Adminisitrasi Proyek

Administrasi proyek yang harus dikerjakan adalah sebagai berikut :

- a. Membuat Rekap Kuantitas dan Harga
- b. Membuat Daftar Kuantitas dan Harga
- c. Membuat Lay Out Rencana
- d. Membuat Volume Pekerjaan Pasangan
- e. Membuat Volume Pekerjaan Tanah
- f. Foto dokumentasi

Pekerjaan ini dilakukan pada awal pekerjaan (Mutual Check/MC 0%) dan akhir pekerjaan (Mutual Check/MC 100%)



- a. Kemampuan GHIPPA sangat mampu 7,6%, mampu 13,4%, cukup mampu 25,5% dan kurang mampu 32,5%%. Hal ini menunjukkan kemampuan yang lebih meningkat daripada pada proses penawaran
- b. Kesulitan perhitungan volume pasangan dan tanah, mulai dipahami GHIPPA.

(2) Pemeliharaan

Pemeliharaan dilakukan GHIPPA pada bangunan yang dibangun menunjukkan pemeliharaan yang baik. Kemampuan GHIPPA dalam melaksanakan pemeliharaan adalah sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------|-----------|-------|
| a. Sangat mampu | 1 GHIPPA | 2,4% |
| b. Mampu | 29 GHIPPA | 69,0% |
| c. Kurang Mampu | 5 GHIPPA | 11,9% |
| d. Tidak Melaksanakan | 2 GHIPPA | 4,8% |

(3) Harapan GHIPPA

Jika dilakukan pekerjaan konstruksi, GHIPPA berharap adanya pendampingan dari

a. Pendamping Lapang	19 GHIPPA	40,4%
b. Cabang Seksi	14 GHIPPA	29,8%
c. Dinas Pengairan	25 GHIPPA	53,2%
d. Tidak Diketahui	6 GHIPPA	12,8%

III. Strategi Pemberdayaan GHIPPA Implementasi PKPI 2002 - Propinsi Jawa Timur

3

3.1 Dasar Pemikiran

Pemberdayaan GHIPPA merupakan suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan GHIPPA P3A/Gabungan P3A secara demokratis yang mempunyai kewenangan di bidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi dan organisasi serta mempunyai kemampuan mengelola air dan jaringan irigasi, berdasarkan potensi lokal

Strategi pemberdayaan GHIPPA diharapkan GHIPPA dapat melaksanakan hak dan kewajiban di wilayah kerja. Adapun hak dan kewajiban GHIPPA adalah sebagai berikut (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air) :

- (1) Hak HIPPA/GHIPPA dan IHIPPA adalah
 - a. Menentukan Pola Tanam dan Tata Tanam;
 - b. Mendapatkan Hak Guna Air;
 - c. Mendapatkan Alokasi Air;
 - e. Mendapatkan hak mengelola prasarana jaringan irigasi;
 - f. Mendapatkan hak mengelola bendung yang diserahkan kewenangan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Mengatur AD/ART;
 - h. Mengajukan permohonan bantuan dan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah atau pihak lain;
 - i. Memiliki tanah dan harta benda serta melakukan kontrak dengan pillak lain;
 - j. Mendapatkan perlindungan terhadap fungsi lahan beririgasi;
 - k. Mempunyai hak suara dalam pengelolaan sumberdaya air/daerah pengaliran sungai; Melakukan kerjasama dengan pihak lain, termasuk dengan Pemerintah Daerah; dan Menentukan pihak lain yang diajak bekerjasama dengan P3A, termasuk dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban HIPPA/GHIPPA dan IHIPPA adalah
 - a. Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan saluran dan bangunan;
 - b. Mengatur pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan kelebihan air irigasi;
 - c. Melakukan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - e. Menjaga keberlangsungan fungsi jaringan irigasi;

- f. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- g. Mematuhi peraturan perundangan;
- h. Melindungi kepentingan anggota;
- i. Mengembangkan usahatani; dan
- j. Meningkatkan pendapatan anggota.

Dalam menyusun strategi pemberdayaan berdasarkan permasalahan-permasalahan dan orientasi yang hendak dicapai.

3.2 Strategi Pemberdayaan GHIPPA

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Propinsi Jawa Timur, maka strategi yang diterapkan dalam pemberdayaan GHIPPA dibagi dalam aspek-aspek sebagai berikut :

- (1) Aspek Organisasi/Kelembagaan
- (2) Aspek Teknis
- (3) Aspek Keuangan

3.3 Aspek Kelembagaan

Organisasi masyarakat merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan bersama dan mengatur hubungan antar anggota dan lingkungannya. Guna peningkatan kemampuan P3A dalam pengelolaan irigasi, maka perlu dilakukan pembangunan kelembagaan.

Strategi pemberdayaan aspek kelembagaan :

- (1) Memperkuat kelembagaan GHIPPA sampai berbadan hukum.
- (2) Mensosialisasikan sumberdaya/potensi yang dimiliki oleh GHIPPA, yang meliputi :
 - a. Wilayah Pengelolaan Irigasi
 - b. Sarana dan Prasarana Jaringan IrigasiMelakukan pendataan melalui PSTEK dan ditekankan kembali dalam Kesepakatan Pengelolaan – Daerah Layanan, Saluran dan Bangunan, sehingga GHIPPA mengenali sumberdaya yang dimiliki.
- (3) Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dan tata kerja organisasi dengan langkah-langkah :
 - a. Meningkatkan kemampuan peran masing-masing pengurus GHIPPA dengan pelaksanaan administrasi kelembagaan masing-masing pengurus GHIPPA sesuai dengan tata kerja.
Prosedur yang ditempuh :
 - Memberikan contoh buku administrasi yang sesuai tata kerja kepada setiap pengurus GHIPPA;
 - Melakukan transfer ketrampilan administrasi
 - Memantau pelaksanaan tata kerja agar tidak terkonsentrasi pada salah satu pengurus GHIPPA.

- b. Meningkatkan kemampuan bagian teknis administrasi
 - Mensosialisasi tugas bagian teknis.
 - Menginventarisasi potensi jaringan irigasi – PSTEK
 - Melaksanakan pencatatan debit dan data tanaman.
- (4) Meningkatkan aktivitas kelembagaan
- Peningkatan aktivitas kelembagaan dilakukan dengan melakukan :
- a. Sosialisasi fungsi dan peran rapat anggota dan rapat pengurus
 - b. Meningkatkan tata kerja kelembagaan, terutama peran bagian teknis.

3.4 Aspek Teknis

Strategi pemberdayaan aspek teknis meliputi :

- (1) Kesepakatan Wilayah Kerja Operasi
 - a. Daerah Layanan
 - b. Bangunan Irigasi
 - c. Saluran Irigasi
- (2) Operasi Jaringan Irigasi
 - a. Kesepakatan Peran dan Wewenang Operasi

- Rencana Tata Tanam

No.	Uraian Pekerjaan	GHIPPA /IHIPPA	KPL	Pokja
1.	Persiapan Tata Tanam			
	a. Analisa Debit Andalan			<input checked="" type="checkbox"/>
	b. Kebijakan Pangan			<input checked="" type="checkbox"/>
	c. Sosialisasi Debit Andalan dan Kebijakan Pangan		<input checked="" type="checkbox"/>	
	d. Usulan Rencana Tanam	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.	Alokasi Debit Multiguna	Forum Koordinasi DI		
3.	Rencana Tata Tanam Global	Komisi Irigasi		
4.	Rencana Tata Tanam Detail		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Sosialisasi RTTD ke HIPPA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

- Kesepakatan Pembagian Air

No.	Uraian Pekerjaan	GHIPPA /IHIPPA	KPL	Pokja
1.	Pencatatan Debit			<input checked="" type="checkbox"/>
	a. Bangunan Utama		<input checked="" type="checkbox"/>	
	b. Bangunan Suplisi		<input checked="" type="checkbox"/>	
	c. Jaringan Primer	<input checked="" type="checkbox"/>		
	d. Jaringan Sekunder	<input checked="" type="checkbox"/>		
	e. Rekapitulasi Debit	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.	Pencatatan Data Tanaman	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.	Perhitungan RPA			
	a. Pendugaan Debit			<input checked="" type="checkbox"/>
	b. Pendugaan Data Tanaman			<input checked="" type="checkbox"/>
	c. Perhitungan Rencana Pembagian Air	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Penetapan Sistem Pembagian Air	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- b. Melaksanakan Operasi sesuai kesepakatan pembagian peran dan wewenang.
- (3) Pemeliharaan Jaringan Irigasi
 - a. Kesepakatan Prosedur Pemeliharaan
Kesepakatan ini menyangkut waktu pelaksanaan dan pelaksana pemeliharaan yang meliputi :
 - Pengaman dan Pencegahan
 - Penelusuran dan PPKP
 - Pemeliharaan Rutin
 - Pemeliharaan Berkala
 - Pemeliharaan Darurat
 - b. Menghitung Kebutuhan Pemeliharaan
- (4) Menghitung Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi
- (5) Konstruksi Parsipatif
 - a. Peningkatan ketrampilan dan kemampuan (pelatihan) sesuai dengan peran dalam tata kerja kelembagaan
 - b. Peningkatan keterlibatan peran pengurus dalam pelaksanaan pekerjaan
 - Pengisian formulir sesuai dengan tata kerja kelembagaan
 - Meningkatkan rapat koordinasi
 - c. Melaksanakan akutanbilitas pekerjaan konstruksi kepada anggota dengan rapat anggota.

3.5 Aspek Keuangan

Strategi pemberdayaan aspek keuangan adalah sebagai berikut :

- (1) Sosialisasi IPAIR
- (2) Memperkuat komponen pendukung IPAIR
 - a. Memantapkan dan meningkatkan Buku Daftar Anggota
 - b. Mensosialisasi Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi
 - c. Mensosialisasi Kesepakatan Tata Cara Penarikan IPAIR antara HIPPA dan GHIPPA.
 - d. Meningkatkan/mensosialisasi administrasi keuangan IPAIR
 - e. Perubahan nilai IPAIR dalam AD/ART
- (3) Mengupayakan Produk Hukum/Kebijakan Kabupaten dalam mendukung pengelolaan IPAIR oleh petani.
- (4) Membuka wacana pengembangan usaha ekonomi
- (5) Sosialisasi/Penyusunan Proposal Pengajuan Dana ke Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten (DPIK)

3.6 Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam penerapan strategi pemberdayaan organisasi adalah :

(1) Pajak

Peningkatan kelembagaan GHIPPA dengan memiliki NPWP, mempunyai kewajiban melaporkan keuangan kelembagaan setiap tahun sekali. GHIPPA merasa beban, karena keterlambatan melaporkan dikenai sanksi ekonomi.

Perlu penyederhanaan prosedural kelembagaan atau pajak yang dikenakan pada petani.

(2) Bahasa Komunikasi Teknis

Bahasa komunikasi teknis (penggunaan istilah bahasa Inggris atau bahasa Belanda) dalam irigasi masih banyak dipergunakan, sehingga GHIPPA sulit menerima komunikasi.

Perlu penggalangan penggunaan Bahasa Indonesia dalam komunikasi dengan baik dan benar.

(3) Kelembagaan Pengelolaan Irigasi yang belum terbentuk

III. PENUTUP

Penyusunan strategi pemberdayaan dengan sasaran prioritas peningkatan aktivitas kelembagaan, teknis dan keuangan yang difasilitasi oleh KPL dan pokja kabupaten, didukung oleh kebijakan peraturan daerah, dalam makalah ini merupakan refleksi dari penyusunan strategi pemberdayaan yang dilakukan di Propinsi Jawa Timur pada Tahun 2002. Strategi pemberdayaan ini dilakukan berdasarkan evaluasi potensi GHIPPA hasil implementasi pada tahun sebelumnya.

Strategi pemberdayaan ini merupakan strategi pemberdayaan pada tahun ke-3 dari implementasi PKPI di Propinsi Jawa Timur. Setiap tahun selalu dilakukan evaluasi dan perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Dalam Negeri. 2001. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air**. Jakarta.

Dinas PU Pengairan Propinsi Jawa Timur. 1999. **Pedoman Umum Penyerahan Pengelolaan Irigasi**. Dinas PU Pengairan Propinsi Jawa Timur. Surabaya.

Konsorsium PKPI Jatim. 2001. **Laporan Akhir : Pengadaan Tenaga Pendamping Petani**. Universitas Jember - Bappeprop Jawa Timur. Surabaya.

Undang Undang Nomor 77 Tentang Irigasi. Jakarta.

Universitas Jember. 2001a. **Laporan Akhir : Pendampingan P3A Oleh Community Organizer Paket I.** Universitas Jember – Proyek Irigasi Jawa Timur. Surabaya.

Universitas Jember. 2001b. **Laporan Akhir : Pendampingan P3A Oleh Community Organizer Paket II.** Universitas Jember – Proyek Irigasi Jawa Timur. Surabaya.

STRATEGI PEMBERDAYAAN

IMPLEMENTASI PKPI 2002

PROPINSI JAWA TIMUR



Heru Ernanda

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA AIR

LEMBAGA PENELITIAN - UNIVERSITAS JEMBER



Propinsi Jawa Timur



14,991%



Propinsi Jawa Timur
110°54' BT - 115°57' BT
5°37' LS - 8°48' LS

Sawah teknis
715.183 Ha

Sawah 1/2 teknis
98.060 Ha

Sawah Sederhana
98.998 Ha

Luas Panen
1.708.562 Ha

Produksi
8.673.242 ton

17,5%

Stok Nasional

Sumber : Web Site Biro Pusat Stastik, 2002




PKPI Jawa Timur



Tahun 2000
Tahap Persiapan PKPI
- Requirement
- Persiapan Pelatihan

Tahun 2001
Pemberdayaan GHIPPA

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi, Kependagri No. 50 Tahun 2001
Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Kepmenkimpraswil Nomor 529/KPTS/M/2001
Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi Kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air



72 GHIPPA Bappeprop

41 GHIPPA
Proyek Irigasi Jawa Timur

mengalami kesulitan dalam aktivitas kelembagaan dan teknis (PSTEK)

Tahun 2002
peningkatan aktivitas kelembagaan, teknis dan keuangan yang difasilitasi oleh KPL dan pokja kabupaten, didukung oleh kebijakan peraturan daerah




Wilayah Kerja GHIPPA



Desa

1 - 5 Desa	25,00	GHIPPA
5 -10 Desa	35,00	GHIPPA
> 10 Desa	26,00	GHIPPA
Tidak Terisi	14,00	GHIPPA
Rata-Rata	7,92	Desa/GHIPPA

Daerah Layanan

< 250 Ha	22,00	GHIPPA
250 -500 Ha	17,00	GHIPPA
500 - 750 Ha	28,00	GHIPPA
750 - 1000 Ha	14,00	GHIPPA
> 1000 Ha	19,00	GHIPPA
Tidak Terisi	-	GHIPPA
Rata-Rata	783,05	Ha/GHIPPA

Sal. Sekunder 1,15 buah/GHIPPA
Sal. Primer 2,14 buah/GHIPPA

Kecamatan
2,12 kec/GHIPPA

15 GHIPPA

Sosialisasi Wilayah Kerja

25 GHIPPA

PSTEK Kesepakatan Locus

< 5 Petak Tersier	36,00	GHIPPA
5 - 10 Petak Tersier	13,00	GHIPPA
10 - 15 Petak Tersier	18,00	GHIPPA
16 - 20 Petak Tersier	15,00	GHIPPA
> 20 Petak Tersier	1,00	GHIPPA
Tidak Terisi	25,00	GHIPPA
Rata-Rata	15,41	Petak/GHIPPA



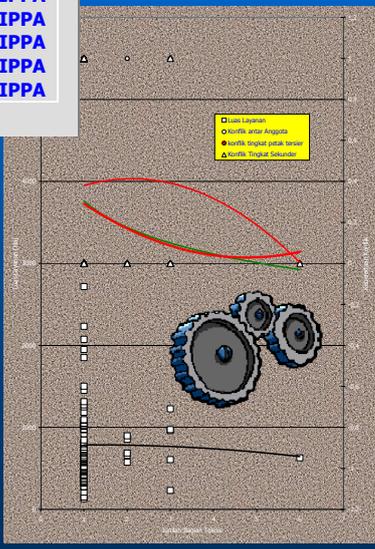

Struktur Organisasi GHIPPA



Jumlah Pengurus

- Ketua
- Wakil Ketua
- Sekretaris
- Bendahara
- Bagian Teknis

100,00	GHIPPA
101,00	GHIPPA
104,00	GHIPPA
103,00	GHIPPA
120,00	GHIPPA



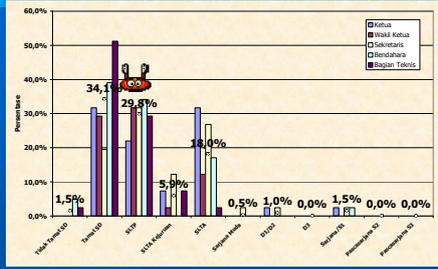
Sosialisasi Fungsi dan Peran Pengurus

Meningkatkan Tata Kerja, Terutama Bagian Teknis




Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Pengurus GHIPPA



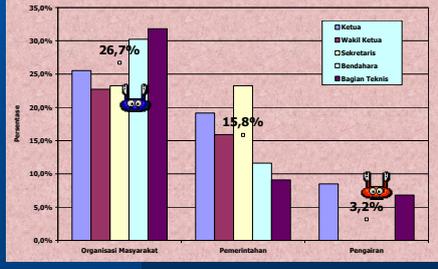


Tingkat Pendidikan	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Bendahara	Bagian Teknis
SD	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
SMP	34,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
SLTA	29,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
SLTA Kejuruan	5,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
SLTA	18,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
SLTA Kejuruan	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
DIPLOMA	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
DIPLOMA 2	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
SARJANA	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PENYUSUNAN D3	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PENYUSUNAN D3	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia





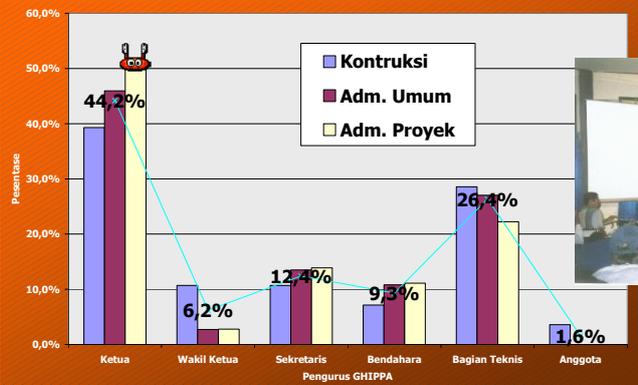
Pengalaman	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Bendahara	Bagian Teknis
Organisasi Masyarakat	26,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Pemerintahan	15,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Pengajaran	3,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



Pelatihan



Pengurus GHIPPA

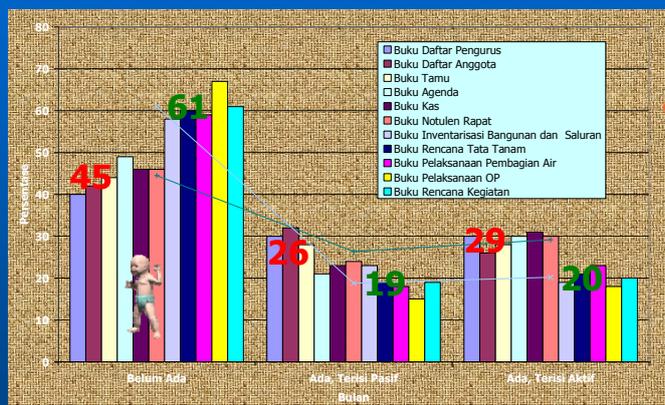


Keterbatasan pelatihan mengakibatkan kecenderungan :

- Ketua mengikuti berbagai aspek pelatihan
- Ketua diharapkan dapat mentranfer pengetahuan

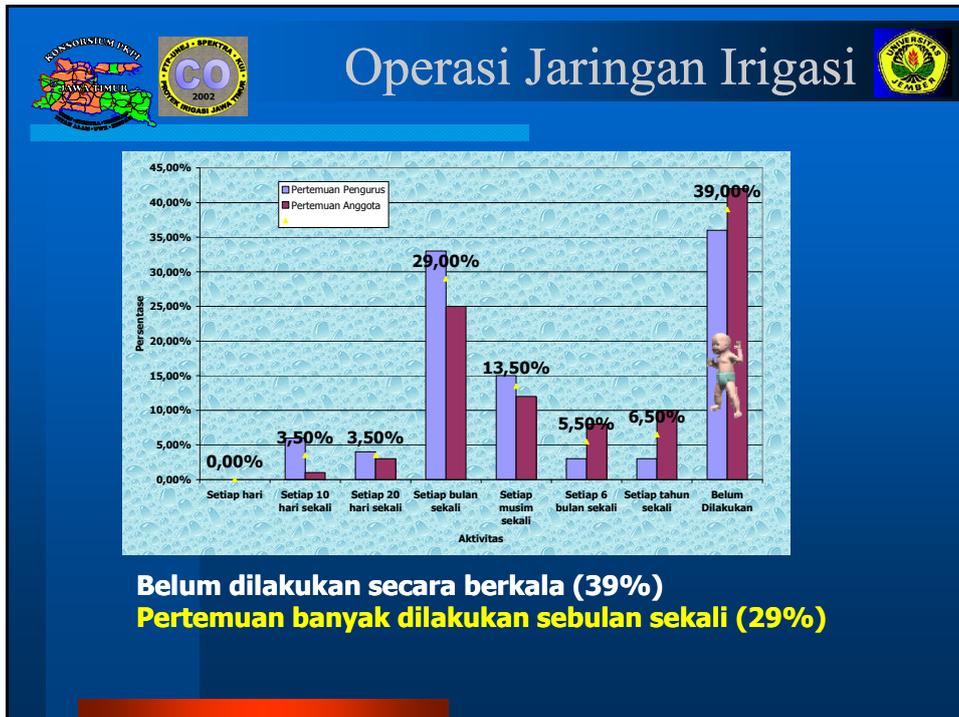
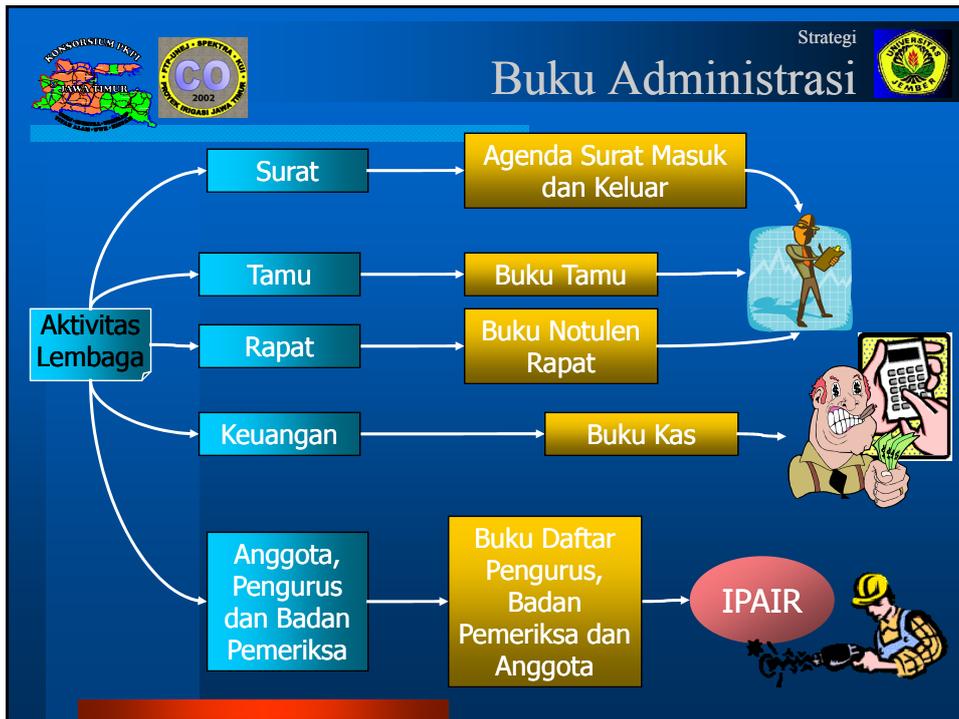


Administrasi GHIPPA



Administrasi yang berjalan dengan baik hanya 29% untuk administrasi umum dan 20% untuk administrasi pelaksanaan OP

Administrasi umum lebih baik daripada administrasi OP





Operasi Jaringan Irigasi

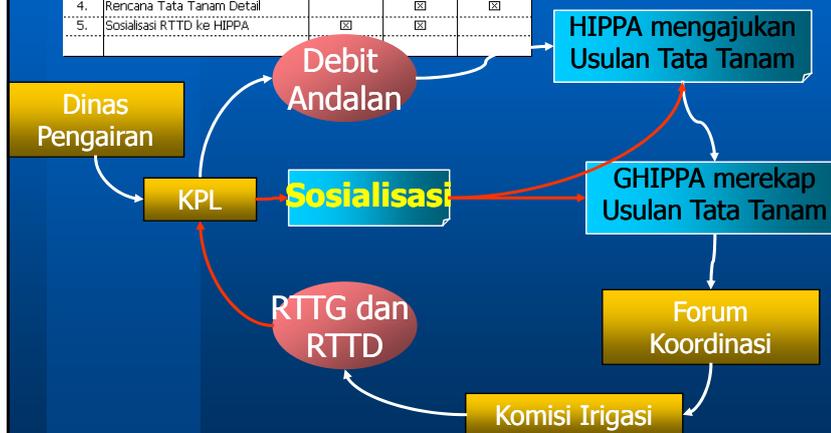


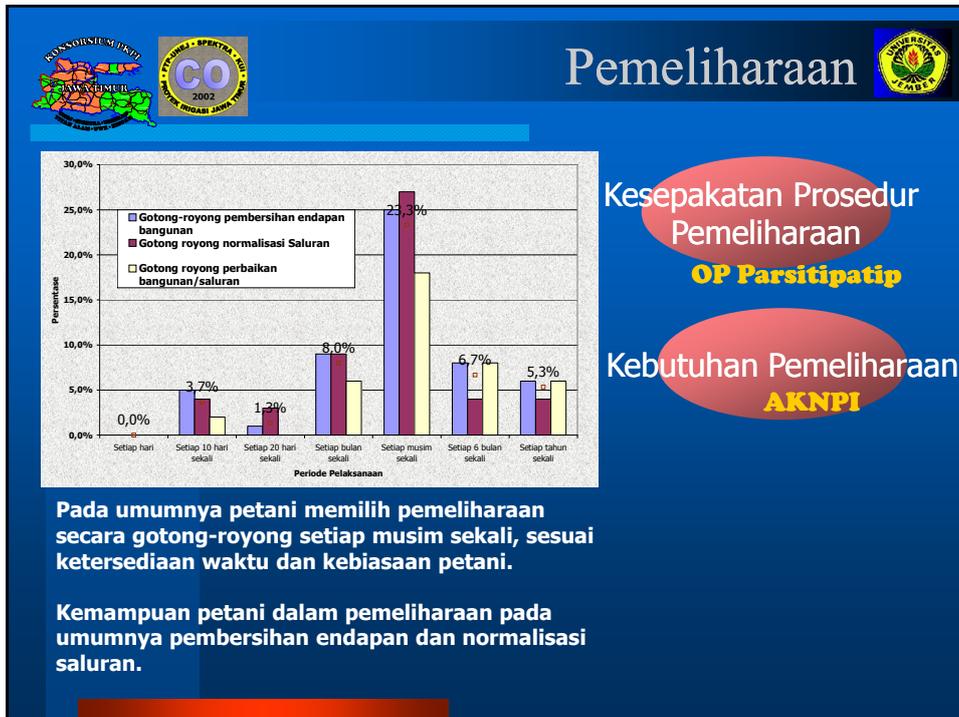
Perencanaan Tata tanam dikehendaki dalam setiap musim sekali (29% GHIPPA)

Operasi pintu air dalam pembagian air dilakukan setiap hari (9,3%) dan setiap 10 hari sekali (14,8%).

No.	Uraian Pekerjaan	GHIPPA/IH-PPA	KPL	Pokja
1.	Persiapan Tata Tanam			
	a. Analisa Debit Andalan			<input checked="" type="checkbox"/>
	b. Kebijakan Pangan			<input checked="" type="checkbox"/>
	c. Sosialisasi Debit Andalan dan Kebijakan Pangan		<input checked="" type="checkbox"/>	
	d. Usulan Rencana Tanam	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.	Alokasi Debit Multiguna		Forum Koordinasi DI	
3.	Rencana Tata Tanam Global		Komisi Irigasi	
4.	Rencana Tata Tanam Detail		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Sosialisasi RTTD ke HIPPA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Kesepakatan Prosedur Tata Tanam



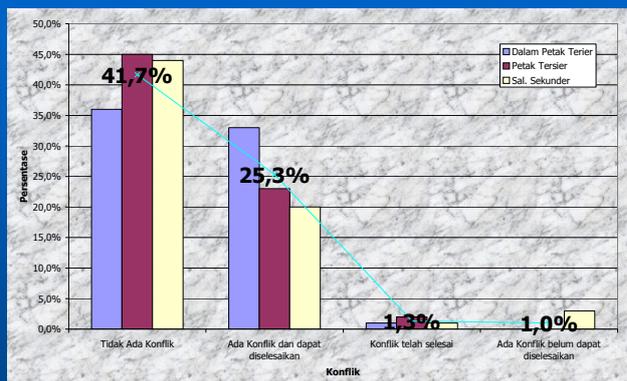




Strategi O&P

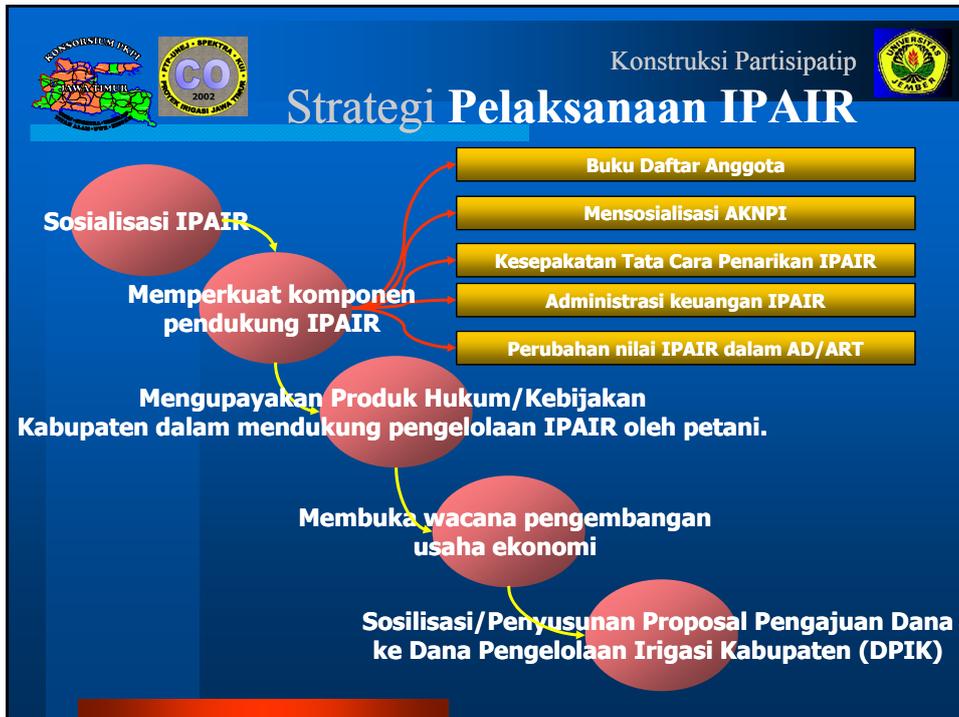
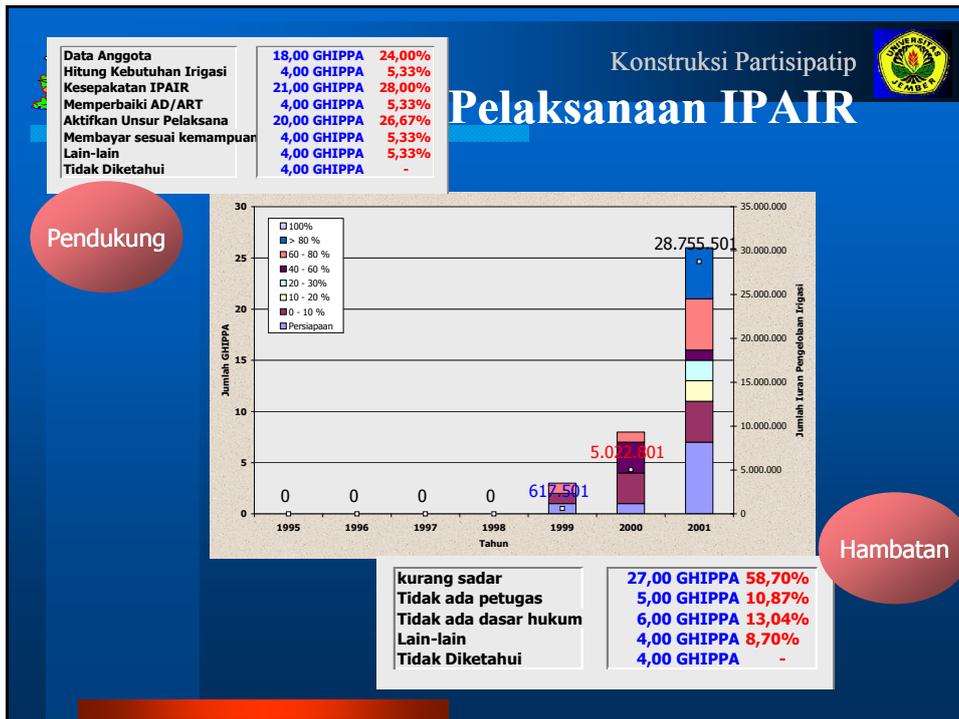


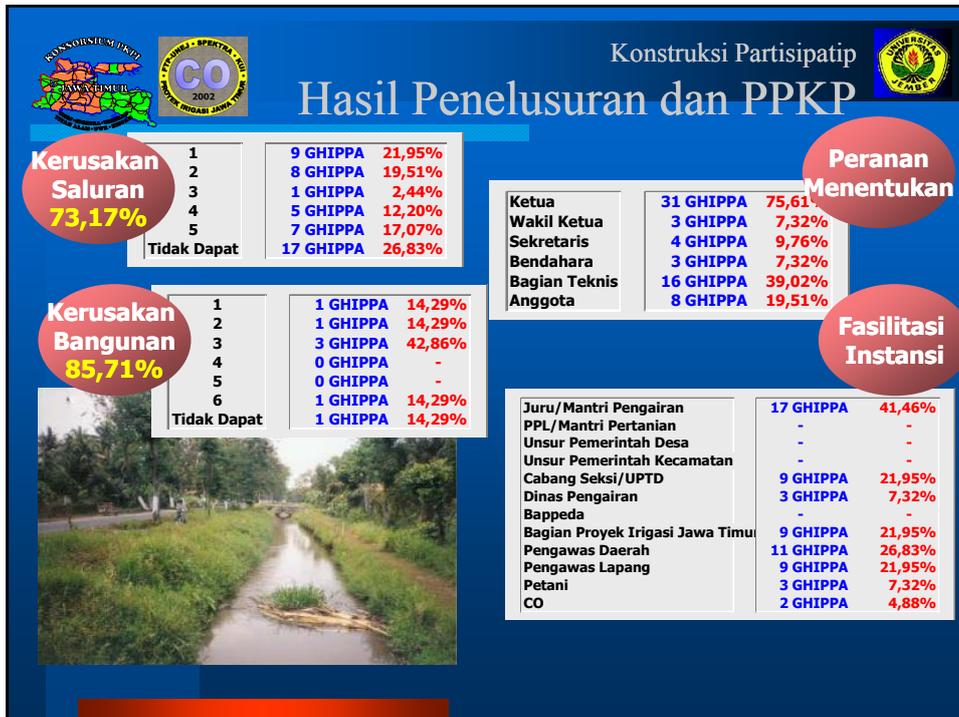
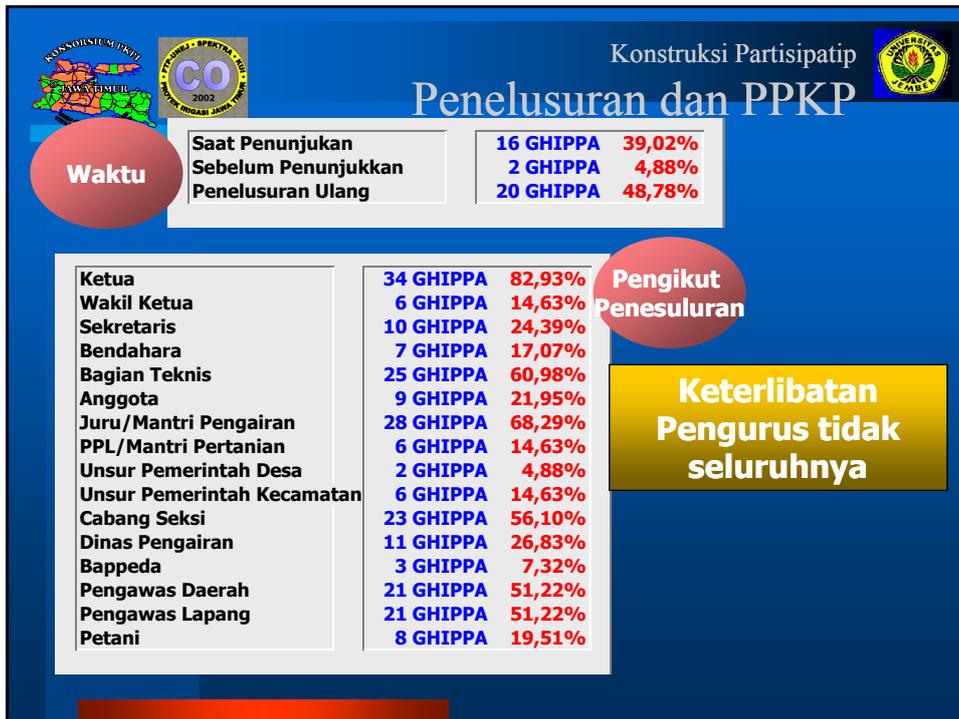
Konflik

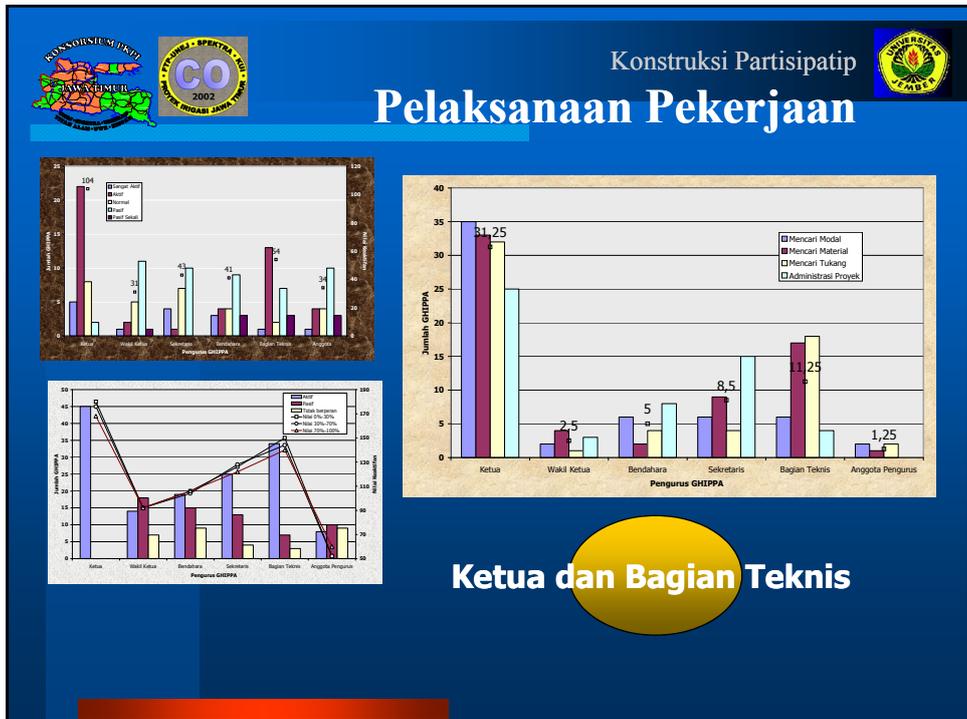
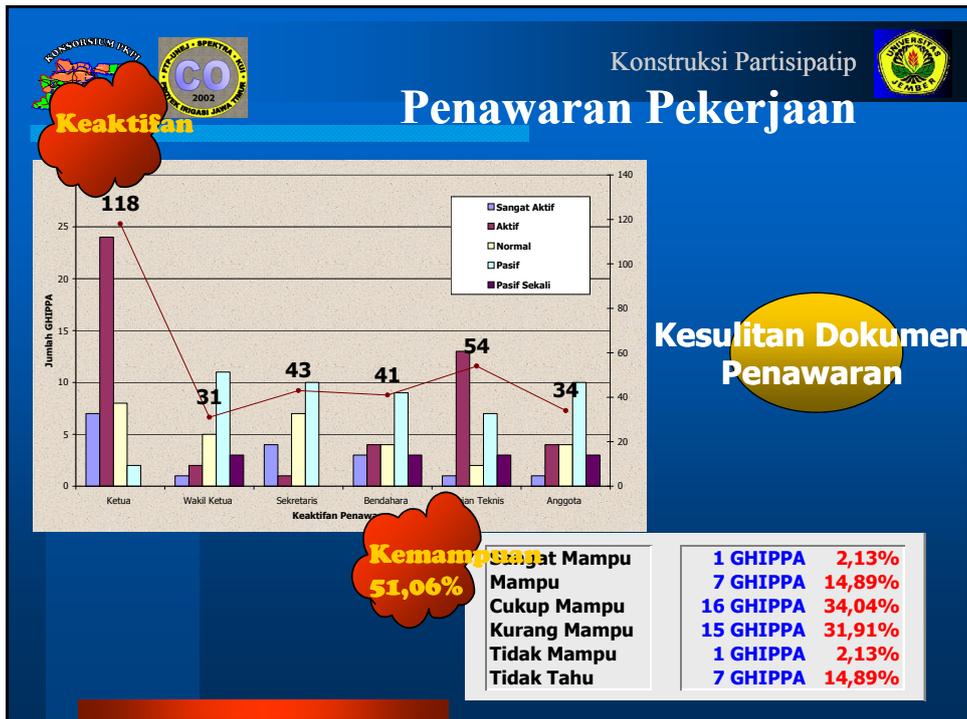


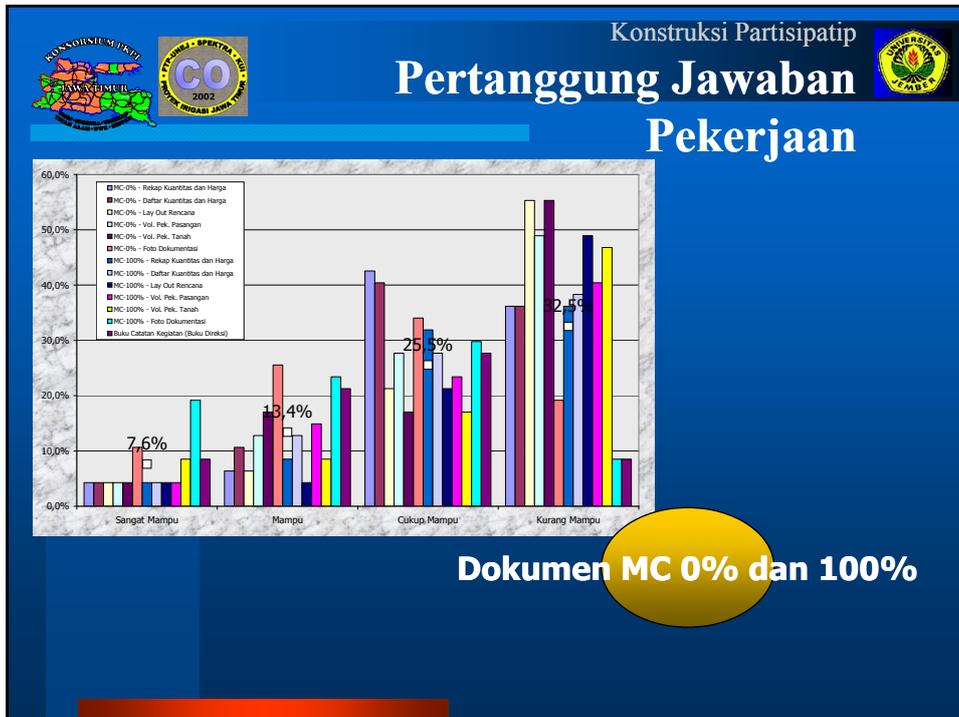
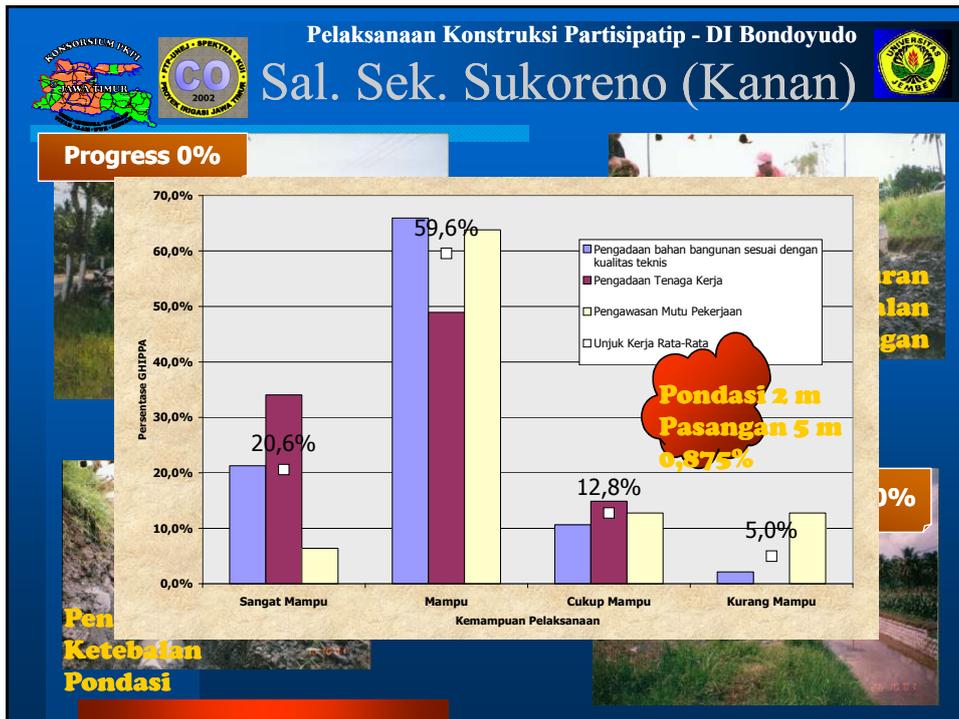
Pada umumnya pembagian air irigasi tidak terjadi konflik (41,7%)

GHIPPA mampu mengatasi konflik yang ada (25,3%) dan konflik yang terjadi pada umumnya terjadi dalam petak tersier yang merupakan wilayah HIPPA.











Program Kerja TPP

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Target	Realisasi	Volume												Keterangan	
					Jun	Juli	Agust	Septem	Oktober	Novem	Des							
I.	Pelatihan TPP																	
II.	Administrasi Kelembagaan																	Pokja Kabupaten/Kotamadya
a.	Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar	G-PPA																Bappeda,
b.	Buku Tamu	G-PPA																
c.	Buku Rencana Rapat	G-PPA																
d.	Administrasi Keuangan	G-PPA																
e.	Buku Daftar Pengurus, Badan Pemeriksa dan Anggota	G-PPA																
III.	Penyempurnaan PSTEK																	
IV.	OP Partisipatif																	
a.	Kesepakatan Pengelolaan																	
•	Daerah Layanan	G-PPA																Dinas Pengairan,
•	Bangunan Irigasi	G-PPA																
•	Saluran Irigasi	G-PPA																
b.	Operasi Jaringan Irigasi	G-PPA																
c.	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	G-PPA																
d.	Tindak Lanjut OP Partisipatif	G-PPA																
•	PKP Penekutan Jaringan Irigasi	G-PPA																
•	Pengisian Daftar Btan Pendukung Lapangan	G-PPA																Dinas Pertanian,
•	Penekutan	G-PPA																
•	PKP	G-PPA																
V.	Penyusunan Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi																	
a.	Data Pendukung																	
•	Daerah Layanan	G-PPA																
•	Bangunan Irigasi	G-PPA																
•	Saluran Irigasi	G-PPA																
b.	Perhitungan Volume Pekerjaan	G-PPA																
c.	Penyusunan ANPP	G-PPA																
d.	Penyusunan ANPP	G-PPA																
e.	Penyusunan ANPP	G-PPA																
VI.	Sosialisasi ke HPPA																	
a.	Buku Daftar Pengurus, Badan Pemeriksa dan Anggota	HPPA																
b.	Revisi Jadwal Pengelolaan Irigasi	HPPA																
c.	Pendataan Pengelolaan Irigasi	HPPA																
d.	ANPP	HPPA																
VII.	Proposal DPRK																	
a.	Dana Peningkatan SDM	G-PPA																
b.	Dana Stimulan	G-PPA																
c.	Dana Rehabilitasi dan Peningkatan II	G-PPA																



Notulen Rapat



M-05 Notulen Rapat

Telah dilaksanakan Pemberdayaan Notulen Rapat dengan kegiatan sebagai berikut :

Isi atau berikan tanda silang pada kotak yang tersedia (X) sesuai kegiatan yang dilakukan

- (1) Penjelasan Kegunaan Notulen Rapat
- (2) Contoh Pengisian Notulen Rapat sebanyak _____ lembar
- (3) Selama bertugas, Tenaga Pendamping Petani membantu sekretaris GHIPPA mengisi buku ini.

Peserta Kegiatan adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1. _____
2.			2. _____
3.			3. _____
4.			4. _____
5.			5. _____

Bagi kami, kegiatan ini Bermanfaat
 Tidak Bermanfaat

Karena _____

Penilaian TPP dalam pelaksanaan Kegiatan ini Aktif
 Pasif

dengan alasan sbb : _____

Atas bantuan dan kerjasama yang telah dibina, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Gabungan HIPPA,

(_____)

B05 DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : _____
 Jam : _____
 Tempat : _____
 Pokok Pembahasan : _____
 Gabungan HIPPA : _____
 Kabupaten : _____

No.	Nama	Jabatan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

